

Judul : Pasang Surut Kantor Staf Presiden
Tanggal : Sabtu, 18 April 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 14

Pasang Surut Kantor Staf Presiden

Selama 18 bulan bekerja pada era Presiden Prabowo Subianto, payung hukum Kantor Staf Presiden belum juga diperbarui meski tugas dan fungsinya sudah berubah. Lantas, bagaimana sepak terjang lembaga pembantu terdekat presiden itu?

Kurnia Yunita Rahayu

Gedung Bina Graha yang terletak di lokasi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menjadi rami setiap hari Rabu. Sudah tujuh pekan berturut-turut, Kantor Staf Presiden yang menempati bangunan peninggalan Orde Baru itu menggelar konferensi pers mingguan yang melibatkan berbagai kementerian/ lembaga. Setiap Rabu mulai pukul 10:00-12:00, wartawan beserta para menteri atau pimpinan lembaga pemerintah memenuhi ruang kendali kantor tersebut.

Tak hanya dihadiri banyak pihak, jumpa pers juga membahas isu yang beragam. Pada Rabu (15/4/2023), misalnya, agenda rutin mingguan itu menghadirkan Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf untuk membahas persiapan penyelenggaraan ihdad haji 2026 yang digelar sepekan lagi.

Sebelumnya, ada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono serta Menteri Perhubungan Dedy Purwagandhi yang membahas persiapan mudik Lebaran. Kemudian pernah pula Menteri Perdagangan Budi Santoso membahas evaluasi perdagangan nasional di sepanjang pekan libur Lebaran.

Namun, di tengah banyaknya isu yang dibahas bergantian, ada satu topik yang selalu hadir setiap pekan: perkembangan program hasil terakut cepat (PHTC) atau sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih yang tergolong PHTC disampaikan kepada publik oleh Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari. Ia tak pernah bicara hal lain di luar PHTC kendati ditanyai berbagai isu oleh wartawan.

Melalui agenda mingguan itu, KSP kini menyapa masyarakat secara rutin. Agenda ini muncul setelah lebih dari satu tahun, tepatnya sejak Prabowo-Gibran Rakabuming memerintah. KSP tidak pernah menggelar kegiatan yang terbuka untuk publik. Satu-satunya momen yang mengizinkan masyarakat terhadap lembaga tersebut adalah ketika Presiden meresmikan Kabinet Merah Putih pada September 2025. Saat itu, Presiden mengganti Kepala Staf Kepresidenan dari AM Putranto ke Muhammad Qodari.

Setelah dilantik Qodari yang sebelumnya dikenal sebagai pengamat politik serta pendiri lembaga survei Indo-Barometer sempat mengadakan jumpa pers mingguan. Ia membuka diri untuk ditanyai mengenai hal apa pun terkait dengan dinamika pemerintahan. Namun, tak sampai satu bulan berlan-



Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (kiri) bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari (kanan) memberikan keterangan pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/4/2023). Konferensi pers tersebut memaparkan progres Program Hasil Terakut Cepat (PHTC) dan persiapan penyelenggaraan ihdad haji 2026.

agenda tersebut hilang tanpa kabar. Qodari, yang sempat menjadi salah satu pintu informasi Istana selain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, tak bisa lagi dijangkau. Sejak saat itu, suara KSP dan jajaran pimpinannya tak pernah lagi terdengar. Nama KSP baru menyusul kembali empat bulan setelahnya, ketika Presiden Prabowo meresmikan Satuan Pénanganan Pemukiman Gini (SPPG) Poli Palmerah, Jakarta, pertengahan Februari 2026.

Dalam padito persman di-rap MBG tersebut, Presiden menyiratkan banyaknya pihak yang mengkritik dan meragukan keberhasilan program unggulannya. Ia pun meminta bantuan dari Qodari untuk mengumpulkan jejak digital yang terakut.

"Pak Qodari, tolong dikam-pun, ya, klip video-klip video yang meramalkan kita pasti gagal, yang mengatakan saya mengkhianati Bangsa Indonesia, MBG ini penghinaan kepada bangsa Indonesia. Kita mau menyelamatkan anak-anak kita dibuang mengemis, ini harus ada rekam digital, ya, direkam semua. Aku minta biar tiap malam saya lihat-lihat," tutur Prabowo saat itu.

Perintah langsung Prabowo kepada Qodari di hadapan publik itu seolah menjadi momen penting bagi KSP. Berselang dua pekan setelahnya, untuk pertama kali KSP kembali menggelar jumpa pers. Qodari tampil seorang diri di ruang kendali KSP untuk menjelaskan

perkembangan dan capaian pemerintah dalam program MBG. Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih. Sejak saat itu, KSP tidak hanya kembali ke hadapan publik. Lembaga itu juga mulai muncul di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada Senin (23/4), KSP mengikuti rapat dengar pendapat di Komisi XIII DPR setelah 18 bulan bekerja. KSP merupakan mitra kerja Komisi XIII DPR.

"Momen ini sangat istimewa buat kami secara pribadi karena ini pertama kali saya bertemu langsung dengan Komisi XIII sejak dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan," tutur Qodari di hadapan pimpinan dan anggota Komisi XIII DPR.

Payung hukum
Dalam rapat yang berlangsung selama hampir 90 menit, Qodari memaparkan seluruh aspek KSP kepada Komisi XIII DPR. Dari dasar hukum, tugas dan fungsi, kerja-kerja yang telah dilakukan, hingga tantangan yang dihadapi, ihdad lembaga yang baru dibuat, Qodari memperkenalkan semua elemen kantor yang dia pimpin.

KSP sudah berdiri sejak era Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dasar hukum keberadaan KSP juga masih mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2019 tentang KSP. Padahal, menjelang akhir periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, fungsi KSP telah diubah. Pada Agustus 2024, Jokowi mengeser fungsi

satu dari lima kedepatan di KSP menjadi lembaga baru. Melalui Perpres No 82/2024, Jokowi membentuk Kantor Komunikasi Kepresidenan yang merupakan pengalihan dari kedepatan komunikasi politik KSP. Konsekuensinya, ketika memasuki era Presiden Prabowo, KSP tak lagi memiliki kedepatan komunikasi politik. Kini, KSP hanya punya empat kedepatan, yakni Deputy 1 Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasaran; Deputy 2 Bidang Pangan dan Perencanaan; Deputy 3 Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Qodari pun mengakui, pihaknya telah meyoan draf perpres baru untuk mengakomodasi penataan organisasi yang telah dilakukan. Akan tetapi, hingga saat ini draf itu belum juga disahkan.

Anggaran turun 60 persen
Selain belum memiliki payung hukum, anggaran KSP juga masih meragukan ke lembaga lain, yakni Kementerian Sekretaris Negara. Pada tahun 2026, berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, 7 Oktober 2025, mengenai penyesuaian rencana kerja dan anggaran pada bagian anggaran 007, KSP mendapat pagu sebesar Rp 35,1 miliar. Turun drastis dibandingkan anggaran tahun 2025, yang

mencapai Rp 108,2 miliar, tetapi terkena efisiensi hingga menjadi Rp 90,6 miliar. Berbelak anggaran yang turun lebih dari 60 persen dihindarkan tahun sebelumnya. KSP tetap melaksanakan berbagai tugas. Pertama, pengendalian program prioritas melalui rapat koordinasi, verifikasi lapangan, dan *debtflowing* atau memutus hambatan antarkementerian/ lembaga. Pengendalian isu strategis juga dilakukan dengan kajian, audiensi, serta pembuatan rekomendasi berbagai sektor dan lintas kementerian/ lembaga, sesuai dengan program prioritas presiden.

Untuk menuntaskan seluruh kegiatan tersebut, anggaran pagu anggaran KSP sudah terakut lebih dari 70 persen. Padahal, tahun 2026 masih tersisa lebih dari delapan bulan. "Realisasi anggaran KSP sampai dengan 8 April 2026 adalah sebesar Rp 279 miliar atau 77,73 persen dari pagu alokasi anggaran yang dapat digunakan," tutur Qodari.

Sejumlah legislator pun menyoan pagu anggaran KSP yang tajam dengan tugasnya. Apalagi, kata anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Arwir Sadid, KSP memiliki fungsi krusial yang tak dimiliki lembaga lain, yakni *debtflowing*. Tak hanya mampu memutus hambatan yang terakut antar-kementerian/ lembaga, KSP juga dinilai bisa menjadi penghubung berbagai pihak

ke Presiden. "Ada fungsi yang membuat KSP sulit, yaitu *debtflowing*. Kepertemuan ini membuat kita punya ekspedisi," tuturnya. Di tengah banyaknya sumbu-butan koordinasi di tengah 48 kementerian dan sejumlah lembaga dalam melaksanakan berbagai program prioritas pemerintah, fungsi *debtflowing* yang dimiliki KSP dinilai krusial. Akan tetapi, peran itu tak bisa optimal jika lembaga tersebut masih beroperasi tanpa payung hukum yang relevan.

"Kami berharap kekosongan hukum ini segera dilalui agar supaya bisa melakukan *debtflowing* antar-kementerian. Perpres yang baru, kalau bisa lebih cepat lebih baik," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Golkar Dewi Asmara.

Namun, hingga saat ini belum ada perkembangan mengenai tindak lanjut perpres baru KSP. *Atenas* telah menyoan hal tersebut kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Hingga tulisan ini diturunkan, Prasetyo tidak menjawab pertanyaan yang disampaikan melalui pesan singkat diaring.

Pembantu terdekat
Berbeda dari sejarah, KSP merupakan lembaga yang strategis tidak hanya untuk memutus hambatan antar-kementerian/ lembaga. Dari periode ke periode, lembaga yang berkanor di Bina Graha yang terletak di sayap timur Istana Kepre-

sidenan Jakarta itu berperan sebagai pembantu terdekat atau salah satu pihak yang paling menentukan dalam pengambilan keputusan presiden.

Masih di hadapan Komisi XIII DPR, Qodari bercerita, embrio KSP dimulai dengan pendirian Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Di bawah kepemimpinan Kuntoro Mangkusubroto, setiap bulan UKP4 memancarkan rapor setiap menteri.

Pada era Jokowi, UKP4 diubah menjadi KSP yang pertama kali dipimpin oleh Luth Binsar Pandjaitan. Luth membawakan KSP menjadi lembaga yang membantu pengambilan keputusan presiden secara jauh lebih cepat karena ia dikenal sangat dekat secara personal dengan Jokowi.

Namun, *Atenas* mencatat, lembaga serupa sudah ada jauh sebelum itu. Instansi yang membantu pembantu terdekat presiden sudah dibentuk sejak era Presiden Soeharto melalui Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan (Sekolah-pang). Dalam buku *Intrik dan Lobi Politik Para Penguasa dari Soeharto sampai SBY*, Garu Besar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan Tripta Lesmana mengatakan, Sekolah-pang merupakan salah satu pembantu terdekat presiden (Kompas, 7/1/2020).

Buang kerja Sekolah-pang diletakkan persis di sebelah ruang kerja presiden di Bina Graha. Oleh karena itu, setiap saat presiden bisa memanggil Sekolah-pang untuk memberikan tugas atau menanyakan kemajuan persoalan yang ditangani. Tugas yang diberikan pun banyak terkait pengawasan bantuan presiden di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.

Pada masa pemerintahan BJ Habibie juga pernah ada rencana mengubah sekretariat negara menjadi asisten eskuadif presiden. Namun, rencana itu tidak jadi karena masa jabatan Habibie yang relatif singkat. Akan tetapi, pendekatan dan strategi setiap presiden berbeda-beda. Publik lebih sering diperlihatkan diskusi Presiden Prabowo dengan para menteri dan petinggi Partai Gerindra, partai politik asalnya, ketimbang dengan Kepala Staf Kepresidenan. Qodari yang dilantik pada September 2025 pun baru pertama terlihat mengikuti rapat terbatas dengan Prabowo pada 9 Maret 2026 atau enam bulan setelah menjabat.

"Kita sekarang ini mencoba untuk berproses lah, bagaimana bisa membantu dia segi itu dengan lebih optimal," tutur Qodari.

Dari ruang kendali di Bina Graha, KSP kembali bergerak. KSP pun terus berproses menjadi bentuk terakut sebagai pembantu terdekat presiden.